



Tinjauan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Dalam Perspektif Ekonomi Klasik Dan Islam Pada Ekonomi Modern

Muhammad Taufiq¹, Maria Melidiana², Jaya Eka Sasmita^{3*}, Lu'luul Bintani⁴, Agung Karunia⁵, Anas Malik⁶, Nabila Putri Delvi⁷

¹⁻⁷ Program Studi Akuntansi Syariah, FEBI, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Korespondensi penulis: jayaekasasmita1@gmail.com

Abstract: *Income distribution inequality is a structural problem that is widely discussed in classical, Islamic, and modern economics. This study discusses how these three approaches understand the roots of inequality and the solutions offered to create distributional justice. Inequality not only affects the economic sector, but also increases social disparities and disrupts community cohesion. Therefore, theoretical comparisons are important. This study analyzes classical economic views based on market mechanisms, explores the principles of distribution in Islamic economics that emphasize spiritual values and social responsibility, and examines modern economic responses to inequality through fiscal policy and the role of the state. The research was conducted using a qualitative method based on a literature review. The results show that the three approaches have different contributions: market efficiency in classical economics, sharia justice in Islamic economics, and a combination of markets and public policy in modern economics. The integrative approach is considered more relevant.*

Keywords: *Income Distribution, Classical Economics, Islamic Economics, Modern Economics*

Abstrak: Ketimpangan distribusi pendapatan menjadi persoalan struktural yang banyak dibahas dalam ekonomi klasik, Islam, dan modern. Penelitian ini membahas bagaimana ketiga pendekatan tersebut memahami akar ketimpangan serta solusi yang ditawarkan guna menciptakan keadilan distribusi. Ketimpangan tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tetapi juga memperbesar kesenjangan sosial dan mengganggu kohesi masyarakat. Oleh karena itu, perbandingan teoritis menjadi penting. Studi ini menganalisis pandangan ekonomi klasik yang berlandaskan mekanisme pasar, mengeksplorasi prinsip distribusi dalam ekonomi Islam yang menekankan nilai spiritual dan tanggung jawab sosial, serta menelaah respon ekonomi modern terhadap ketimpangan melalui kebijakan fiskal dan peran negara. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif berbasis studi pustaka dari berbagai literatur. Hasilnya menunjukkan bahwa ketiga pendekatan memiliki kontribusi berbeda: efisiensi pasar dalam ekonomi klasik, keadilan syariah dalam ekonomi Islam, dan kombinasi pasar serta kebijakan publik dalam ekonomi modern. Pendekatan integratif dinilai lebih relevan.

Kata kunci: *Distribusi Pendapatan, Ekonomi Klasik, Ekonomi Islam, Ekonomi Modern*

1. LATAR BELAKANG

Ketimpangan merupakan isu yang tidak pernah usang dalam kajian ekonomi dan kebijakan publik. Fenomena ini menjadi perhatian serius karena berimplikasi langsung terhadap stabilitas sosial, politik, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan (Sugianto, 2025). Ketika distribusi pendapatan terpusat hanya pada segelintir elite ekonomi, maka akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja menjadi terbatas bagi masyarakat miskin, sehingga memperbesar jurang sosial dan memperlambat mobilitas sosial. Dalam sejarah pemikiran ekonomi, ketimpangan pendapatan telah menjadi pokok bahasan sejak era ekonomi klasik. Para tokoh seperti Adam Smith, David Ricardo, dan Thomas Malthus mencoba menjelaskan dinamika distribusi pendapatan melalui pendekatan-pendekatan pasar dan

produktivitas. Mereka menganggap ketimpangan sebagai proses alami dalam tahap awal pembangunan ekonomi. Dalam kerangka pemikiran mereka, pasar memiliki kekuatan korektif sendiri melalui kompetisi dan akumulasi modal.

Adam Smith melalui gagasan "*invisible hand*" menyatakan bahwa jika individu mengejar kepentingan pribadinya dalam pasar bebas, maka hasil akhirnya adalah efisiensi alokasi sumber daya yang juga menguntungkan masyarakat secara umum. Ia menekankan pentingnya pembagian kerja dalam meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Namun, Smith juga menyadari bahwa kekuasaan pasar yang terkonsentrasi dapat menimbulkan ketimpangan yang merugikan masyarakat. David Ricardo menyoroti bagaimana ketimpangan muncul dari perbedaan kepemilikan faktor produksi, terutama tanah. Ia mengembangkan teori distribusi antara pemilik tanah, kapitalis, dan pekerja. Ketika permintaan terhadap lahan meningkat, maka sewa tanah naik dan menyebabkan pendapatan pemilik tanah melonjak, sementara bagian pendapatan pekerja justru menurun. Ini menggambarkan bahwa pasar tidak sepenuhnya adil dalam membagi hasil ekonomi (Putri & Natha, 2014).

Thomas Malthus menambahkan dimensi demografis dalam analisis ketimpangan. Ia berpandangan bahwa pertumbuhan penduduk yang lebih cepat daripada pertumbuhan produksi pangan akan menimbulkan tekanan terhadap upah dan meningkatkan kemiskinan. Dalam pandangannya, ketimpangan merupakan akibat dari ketidakseimbangan antara populasi dan sumber daya yang tersedia. Meskipun memiliki kontribusi besar dalam teori ekonomi, pendekatan klasik dianggap terlalu optimistis terhadap kemampuan pasar dalam menciptakan keadilan distribusi. Realitas menunjukkan bahwa pasar cenderung memperkuat posisi pemilik modal dan melemahkan posisi kelompok rentan. Oleh karena itu, pendekatan ini perlu dilengkapi dengan perspektif lain yang lebih holistik dan moral. Dalam hal ini, ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang berbasis nilai-nilai keadilan sosial, spiritualitas, dan tanggung jawab kolektif. Berbeda dengan ekonomi klasik yang berlandaskan rasionalitas individual, ekonomi Islam menempatkan distribusi pendapatan dalam konteks amanah, keadilan, dan kemaslahatan. Ketimpangan bukan hanya persoalan efisiensi, tetapi juga persoalan moral (Simanullang et al., 2021).

Ekonomi Islam mengakui perbedaan kemampuan dan kepemilikan, tetapi menolak akumulasi kekayaan yang berlebihan dan tidak produktif. Hal ini tercermin dalam larangan riba, perintah menunaikan zakat, serta anjuran infaq, sedekah, dan wakaf. Semua instrumen ini dirancang untuk mendistribusikan kekayaan dari kelompok kaya kepada yang membutuhkan. Prinsip distribusi dalam Islam menekankan bahwa kekayaan tidak boleh beredar di kalangan orang kaya saja. Firman Allah dalam QS. Al-Hasyr: 7 menyatakan dengan tegas larangan

tersebut. Oleh karena itu, negara dalam ekonomi Islam berperan aktif sebagai fasilitator distribusi melalui lembaga baitul maal yang mengelola dana umat untuk kesejahteraan bersama. Islam juga mengatur kepemilikan dalam bentuk ganda, yaitu kepemilikan individu yang dibatasi oleh kepentingan sosial, dan kepemilikan kolektif seperti sumber daya alam yang dikelola untuk kemaslahatan umat. Ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan dalam Islam bertumpu pada keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Sementara itu, dalam konteks ekonomi modern, pendekatan terhadap ketimpangan menjadi lebih kompleks. Kemunculan teori-teori baru seperti Hipotesis Kuznets menunjukkan bahwa ketimpangan akan meningkat pada tahap awal pembangunan, lalu menurun setelah negara mencapai kemakmuran. Namun kenyataannya, banyak negara mengalami stagnasi ketimpangan pada level tinggi. Ekonom kontemporer seperti Thomas Piketty dan Joseph Stiglitz mengkritisi ketimpangan yang ditimbulkan oleh sistem kapitalistik yang tidak diimbangi oleh regulasi yang memadai. Mereka menekankan pentingnya intervensi negara melalui pajak kekayaan, redistribusi, dan perlindungan sosial untuk mengurangi kesenjangan. Ekonomi modern mengembangkan kebijakan fiskal yang berpihak kepada kelompok miskin melalui pajak progresif, subsidi, dan bantuan sosial. Selain itu, investasi pada pendidikan, pelatihan keterampilan, dan kesehatan dipandang sebagai strategi jangka panjang untuk meningkatkan mobilitas sosial (Hartono & Resosudarmo, 2004).

Pendekatan ekonomi modern juga menekankan pentingnya penguatan pasar tenaga kerja melalui regulasi upah minimum, perlindungan buruh, dan sistem jaminan sosial. Ketimpangan dipandang sebagai ancaman terhadap pertumbuhan inklusif dan dapat menimbulkan instabilitas politik jika dibiarkan terus-menerus. Dalam kerangka kebijakan publik, ekonomi modern juga mengembangkan alat ukur seperti Koefisien Gini dan *Theil Index* untuk mengukur tingkat ketimpangan secara kuantitatif. Hal ini membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan berbasis data. Ketiga pendekatan ekonomi ini klasik, Islam, dan modern memiliki titik temu dalam pengakuan bahwa distribusi pendapatan yang adil sangat penting bagi kelangsungan pembangunan dan stabilitas masyarakat. Namun, pendekatan dan solusi yang ditawarkan tentu berbeda-beda.

Ekonomi klasik cenderung mempercayai mekanisme pasar sebagai solusi otomatis, meskipun mengakui bahwa ketimpangan bisa terjadi dalam tahap awal pembangunan. Ekonomi Islam menitikberatkan pada nilai keadilan dan keberkahan melalui sistem distribusi berbasis moral dan spiritual. Sementara ekonomi modern lebih menekankan kebijakan publik dan intervensi negara dalam menciptakan redistribusi yang efektif. Perbedaan ini mencerminkan landasan filosofis yang berbeda: ekonomi klasik berbasis liberalisme dan

efisiensi, ekonomi Islam berbasis wahyu dan etika, sedangkan ekonomi modern berbasis empirisme dan keseimbangan antara pasar dan negara(Wulandari et al., 2016).

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji ketiga pendekatan ini secara komparatif untuk memahami kelemahan dan kekuatan masing-masing. Penelitian ini dilakukan sebagai upaya menyajikan tinjauan teoretis terhadap pandangan ekonomi klasik, ekonomi Islam, dan ekonomi modern dalam memahami serta menangani ketimpangan distribusi pendapatan. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan kerangka berpikir yang lebih integratif dan kontekstual dalam merumuskan solusi atas ketimpangan pendapatan yang masih menjadi tantangan besar bagi negara berkembang seperti Indonesia(Syahputra et al., 2018).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dan pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam(Sugianto & Mohammad, 2024). Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali makna, persepsi, dan interpretasi yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, terutama yang berkaitan dengan nilai-nilai Retribusi pendapatann data dikumpulkan dari berbagai literatur yang relevan, seperti buku-buku ekonomi Islam, jurnal ilmiah, artikel, laporan riset, serta dokumen-dokumen syariah yang membahas retribusi pendapatan Sumber-sumber tersebut digunakan untuk memperkuat argumentasi teoritis serta membangun kerangka konseptual penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Ekonomi Klasik Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Ekonomi klasik merupakan fondasi awal dari pemikiran ekonomi modern yang berkembang pada abad ke-18 dan ke-19. Pemikiran ini dipelopori oleh para ekonom terkemuka seperti Adam Smith, David Ricardo, dan Thomas Robert Malthus, yang menekankan pentingnya kebebasan individu, peran pasar, serta hukum penawaran dan permintaan sebagai penentu utama dalam mekanisme ekonomi. Dalam konteks distribusi pendapatan, ekonomi klasik memandang bahwa ketimpangan adalah hasil alami dari dinamika pasar yang bebas dan tidak terdistorsi(Madnasir, 2011).

Adam Smith, dalam karya monumentalnya *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* (1776), memperkenalkan konsep "*invisible hand*" atau tangan tak terlihat. Menurut Smith, jika setiap individu dibiarkan untuk mengejar kepentingan pribadinya di pasar bebas, maka hasil akhirnya adalah distribusi sumber daya yang efisien yang juga

menguntungkan masyarakat secara keseluruhan. Ia menekankan bahwa melalui pembagian kerja (*division of labor*), produktivitas meningkat secara signifikan dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan secara agregat. Dalam kerangka ini, distribusi pendapatan akan mengikuti hasil dari kontribusi individu terhadap produktivitas ekonomi. Namun, Smith juga menyadari bahwa ketimpangan bisa muncul jika kekuasaan pasar terkonsentrasi pada pihak tertentu, seperti monopoli atau kolusi antara pemilik modal (Zuraidah, 2013).

Sementara itu, David Ricardo memperluas analisis distribusi pendapatan melalui teori nilai kerja dan teori distribusi antara tiga kelas utama dalam masyarakat: tuan tanah (*landowners*), kapitalis dan pekerja. Dalam pandangan Ricardo, pertumbuhan ekonomi dan akumulasi modal akan menyebabkan peningkatan permintaan terhadap lahan, sehingga menaikkan sewa bagi pemilik tanah. Akibatnya, bagian pendapatan yang diterima oleh kapitalis dan pekerja cenderung menurun. Ricardo melihat bahwa distribusi pendapatan sangat dipengaruhi oleh kelangkaan faktor produksi, terutama tanah. Ketika penduduk bertambah, tanah yang subur menjadi langka, dan pemilik tanah memperoleh keuntungan lebih besar, sedangkan upah pekerja ditekan untuk bertahan di tingkat subsisten. Dengan demikian, Ricardo melihat bahwa ketimpangan bisa melebar jika tidak ada mekanisme koreksi dalam pasar (Ii, 2010).

Thomas Malthus, rekan sezaman Ricardo, dikenal dengan teori populasi yang berpengaruh. Dalam bukunya *An Essay on the Principle of Population* (1798), ia mengemukakan bahwa pertumbuhan penduduk cenderung lebih cepat daripada pertumbuhan ketersediaan pangan, mengikuti hukum pertumbuhan geometris dan aritmetis. Akibat dari ketidakseimbangan ini adalah terjadinya tekanan terhadap sumber daya alam, penurunan upah riil, dan meningkatnya kemiskinan. Malthus percaya bahwa ketimpangan dan kemiskinan adalah fenomena yang tidak terelakkan dalam sistem ekonomi tanpa regulasi yang memadai terhadap pertumbuhan penduduk. Ia juga menekankan perlunya penahanan moral (*moral restraint*) sebagai mekanisme untuk mengontrol jumlah penduduk dan dengan demikian mengurangi tekanan terhadap distribusi pendapatan (Siara, 2021).

Secara umum, ekonomi klasik cenderung percaya pada kekuatan pasar dalam mengatur distribusi pendapatan. Ketimpangan yang terjadi dianggap sebagai hasil sementara dari proses pembangunan ekonomi yang sedang berlangsung. Misalnya, dalam tahap awal industrialisasi, pendapatan akan terkonsentrasi pada pemilik modal karena mereka memiliki alat produksi, tetapi seiring waktu, investasi modal akan meningkatkan produktivitas dan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan, yang pada akhirnya akan meningkatkan upah dan mengurangi kesenjangan. Namun demikian, pendekatan klasik ini memiliki kelemahan dalam memahami

realitas sosial yang kompleks. Mereka kurang menyoroti peran institusi, kekuasaan, dan akses terhadap sumber daya sebagai faktor penting dalam pembentukan ketimpangan. Ekonom klasik berasumsi bahwa semua individu memiliki akses yang sama terhadap peluang pasar, padahal dalam kenyataannya, ketimpangan sering kali diwariskan dan bersifat struktural.

Selain itu, ekonomi klasik tidak mengembangkan konsep kesejahteraan sosial secara eksplisit. Fokus mereka lebih pada efisiensi alokasi sumber daya daripada pemerataan hasil. Dalam banyak kasus, kebebasan pasar justru memperlebar jurang ketimpangan, terutama ketika pasar tidak sempurna atau ketika terjadi akumulasi kekayaan yang tidak diimbangi dengan mobilitas sosial. Ketidakseimbangan ini kemudian menjadi perhatian utama bagi aliran ekonomi selanjutnya, termasuk ekonomi neoklasik, Keynesian, dan tentu saja ekonomi Islam, yang memandang distribusi pendapatan bukan hanya sebagai soal ekonomi, tetapi juga moral dan keadilan (Maskur et al., 2023).

Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa ekonomi klasik meletakkan dasar-dasar pemikiran tentang distribusi pendapatan, namun pendekatannya terlalu optimistik terhadap mekanisme pasar. Meskipun menawarkan analisis yang mendalam mengenai peran faktor produksi dalam pembentukan pendapatan, pemikiran klasik masih belum menyentuh solusi konkret terhadap ketimpangan struktural yang terus berlangsung. Oleh karena itu, analisis klasik tetap penting untuk memahami akar pemikiran ekonomi, namun perlu dilengkapi dengan pendekatan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kenyataan sosial yang kompleks.

Prinsip-Prinsip Distribusi Pendapatan Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, serta diperkuat oleh ijtihad para ulama dan fuqaha sepanjang sejarah Islam. Salah satu nilai fundamental dalam ekonomi Islam adalah keadilan (al-'adl) dalam distribusi pendapatan dan kekayaan. Dalam Islam, distribusi kekayaan tidak hanya dipahami dari sudut pandang efisiensi ekonomi, tetapi juga dari perspektif etika, sosial, dan spiritual. Distribusi yang adil dalam konteks Islam bukan berarti menyamakan secara mutlak jumlah kekayaan setiap individu, tetapi memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang layak terhadap sumber daya ekonomi serta perlindungan dari kemiskinan dan ketimpangan struktural.

Islam mengakui perbedaan kepemilikan dan kemampuan ekonomi antara manusia sebagai bagian dari sunnatullah, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an: "Apakah mereka yang membagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain" (QS. Az-Zukhruf: 32). Namun, perbedaan ini tidak boleh mengarah pada akumulasi kekayaan hanya di

tangan segelintir orang. Al-Qur'an dengan tegas mengingatkan agar distribusi kekayaan tidak terpusat hanya pada kelompok elit, sebagaimana dalam firman Allah: "supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu." (QS. Al-Hasyr: 7). Dari ayat tersebut, terlihat bahwa Islam menolak sistem yang mendorong penumpukan kekayaan dan mendorong sistem yang memastikan sirkulasi kekayaan yang merata ke seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, distribusi pendapatan dalam Islam mengacu pada keseimbangan antara hak individu dan kewajiban sosial (Simanjorang et al., 2009).

Salah satu instrumen penting dalam distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam adalah zakat, yang merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat nisab dan haul. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah spiritual, tetapi juga sebagai instrumen fiskal yang efektif dalam mengalirkan kekayaan dari golongan kaya ke golongan miskin. Zakat mendistribusikan pendapatan secara langsung dan terstruktur kepada delapan golongan yang berhak menerima (asnaf), sebagaimana dijelaskan dalam QS. At-Taubah: 60. Selain zakat, ada pula infaq, sedekah, dan wakaf sebagai bentuk distribusi sukarela yang dianjurkan untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Lebih dari itu, Islam juga memiliki mekanisme pengaturan kepemilikan yang menghindari praktek eksploitasi dan akumulasi kapital yang tidak sehat. Misalnya, riba (bunga) dilarang keras karena dianggap sebagai bentuk pemanfaatan kelemahan ekonomi pihak lain. Larangan riba secara tidak langsung mengatur agar distribusi pendapatan tidak timpang akibat sistem finansial yang menekan golongan miskin. Sebaliknya, Islam mendorong praktik bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, di mana keuntungan dibagi berdasarkan kontribusi dan risiko, bukan sekadar modal (Adolph, 2016).

Pemerintah dalam sistem ekonomi Islam juga memiliki peran penting dalam menjamin distribusi yang adil. Negara diberi mandat untuk mengelola harta milik umum dan mengalokasikannya demi kemaslahatan umat (*maslahah 'ammah*). Harta publik seperti tambang, air, dan sumber daya alam strategis tidak boleh dimiliki secara pribadi atau dikuasai oleh kelompok tertentu. Pemerintah juga memiliki wewenang untuk mengelola baitul maal, yaitu institusi pengelola keuangan negara yang bertujuan untuk menyalurkan dana kepada yang membutuhkan, termasuk pembangunan fasilitas umum, bantuan kepada fakir miskin, dan stabilisasi harga kebutuhan pokok. Dalam era ekonomi modern yang sering kali dikuasai oleh mekanisme kapitalistik dan kompetisi bebas, prinsip-prinsip distribusi dalam ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang lebih manusiawi dan inklusif. Tidak hanya fokus pada akumulasi kekayaan, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan kolektif (*maslahah*) dan tanggung jawab sosial (Sondakh, 2023).

Pendekatan Ekonomi Modern Menjelaskan Dan Menangani Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Dalam paradigma ekonomi modern, ketimpangan distribusi pendapatan bukan hanya sekadar masalah moral atau keadilan sosial, tetapi juga merupakan isu struktural yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial suatu negara. Ekonomi modern memandang bahwa distribusi pendapatan dipengaruhi oleh kombinasi faktor-faktor seperti produktivitas tenaga kerja, pendidikan, struktur pasar tenaga kerja, kebijakan fiskal dan moneter, serta globalisasi dan teknologi. Salah satu teori paling dikenal dalam menjelaskan ketimpangan dalam konteks pembangunan ekonomi adalah Hipotesis Kuznets. Menurut Simon Kuznets (1955), pada tahap awal pembangunan ekonomi, kesenjangan pendapatan akan meningkat seiring dengan peralihan dari sektor pertanian ke industri.

Kurva Kuznets yang berbentuk seperti huruf U terbalik menjadi representasi klasik dari teori ini. Namun, seiring berjalannya waktu, beberapa ekonom modern mengkritik validitas Hipotesis Kuznets, terutama dalam konteks globalisasi dan teknologi digital. Thomas Piketty (2014), dalam karya terkenalnya *Capital in the Twenty-First Century*, menyatakan bahwa kecenderungan alamiah kapitalisme adalah menghasilkan akumulasi kekayaan pada segelintir orang, terutama bila tingkat pengembalian atas modal (r) lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi (g). Dalam kondisi tersebut, ketimpangan akan terus meningkat kecuali ada intervensi serius dari negara. Piketty menekankan pentingnya pajak kekayaan global sebagai bentuk kebijakan redistributif untuk mengurangi konsentrasi kekayaan ekstrem (Fish, 2020).

Untuk menangani ketimpangan distribusi pendapatan, pendekatan ekonomi modern mengusulkan serangkaian kebijakan intervensi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu instrumen paling umum adalah pajak progresif, di mana individu dengan pendapatan lebih tinggi dikenakan tarif pajak yang lebih besar. Pajak ini menjadi sumber pembiayaan bagi program-program sosial seperti subsidi pangan, layanan kesehatan, dan bantuan tunai bersyarat bagi masyarakat miskin. Program kesejahteraan sosial seperti asuransi pengangguran, bantuan pendidikan, dan jaminan hari tua juga merupakan upaya langsung pemerintah dalam menjaga distribusi pendapatan tetap seimbang.

Selain pajak dan transfer sosial, ekonomi modern juga menekankan pentingnya investasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan (*human capital development*). Ketimpangan sering kali bersumber dari perbedaan kemampuan dan akses terhadap sumber daya pendidikan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan dasar hingga tinggi dianggap sebagai strategi jangka panjang yang efektif dalam mengurangi ketimpangan. Pendidikan tidak

hanya meningkatkan produktivitas individu, tetapi juga membuka peluang mobilitas sosial ke atas (*upward social mobility*), yang pada akhirnya berkontribusi pada distribusi pendapatan yang lebih adil (Hariadi et al., 2007).

Kebijakan ketenagakerjaan juga memainkan peran penting. Ekonomi modern mendorong penguatan perlindungan tenaga kerja, penetapan upah minimum, pengaturan jam kerja, dan jaminan ketenagakerjaan sebagai bagian dari strategi pengurangan ketimpangan. Dalam beberapa negara maju, peran serikat buruh juga turut memperkuat posisi tawar pekerja dalam proses negosiasi upah dan kondisi kerja, sehingga mencegah eksploitasi tenaga kerja berupah rendah. Dalam konteks global, globalisasi dan kemajuan teknologi sering kali menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, globalisasi meningkatkan efisiensi dan menciptakan peluang ekonomi baru. Namun, di sisi lain, ia juga berkontribusi terhadap pelebaran jurang antara kelompok pekerja berkeahlian tinggi dan rendah.

Ekonom seperti Joseph Stiglitz menekankan bahwa pasar tidak selalu bekerja secara adil dan efisien tanpa regulasi. Dalam bukunya *The Price of Inequality* (2012), Stiglitz menjelaskan bahwa ketimpangan bukan hanya disebabkan oleh perbedaan kemampuan, tetapi juga oleh kebijakan ekonomi yang bias terhadap pemilik modal dan kaum elit. Oleh karena itu, intervensi pemerintah menjadi sangat penting untuk memastikan agar sistem ekonomi berjalan adil dan inklusif. Lebih lanjut, pendekatan ekonomi modern juga mengembangkan indikator ketimpangan, seperti Koefisien Gini, Theil Index, dan Palm Ratio, yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan di suatu negara. Melalui data ini, pemerintah dapat merumuskan kebijakan publik berbasis bukti (*evidence-based policy*) dan mengevaluasi dampak dari program redistribusi yang telah dijalankan (Chayyani, 2021).

Penelitian terbaru yang dilakukan oleh World Bank (2023) menyebutkan bahwa negara-negara yang menginvestasikan lebih besar pada sektor pendidikan dan kesehatan cenderung memiliki tingkat ketimpangan yang lebih rendah. Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan sosial yang inklusif mampu mengurangi dampak ekonomi dari pandemi COVID-19, terutama bagi kelompok rentan. Di Indonesia, pendekatan ekonomi modern tercermin dalam berbagai program pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta subsidi pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP). Meski demikian, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi tantangan seperti ketepatan sasaran, birokrasi, dan keterbatasan anggaran. Pendekatan ekonomi modern terhadap distribusi pendapatan menekankan pentingnya kombinasi antara mekanisme pasar yang efisien dan intervensi kebijakan negara yang adil dan berpihak pada kelompok rentan.

Persamaan Dan Perbedaan Antara Ketiga Pendekatan Ekonomi Klasik Ekonomi Modern Tersebut Dalam Memandang Keadilan Distribusi

Ketimpangan distribusi pendapatan merupakan isu fundamental dalam ilmu ekonomi yang tidak hanya menyentuh aspek ekonomi semata, tetapi juga berdampak langsung terhadap aspek sosial, politik, bahkan moralitas suatu masyarakat. Ketiga pendekatan besar dalam ekonomi—ekonomi klasik, ekonomi Islam, dan ekonomi modern—mempunyai cara pandang yang khas dalam menjelaskan akar masalah, serta memberikan solusi yang berbeda sesuai dengan landasan epistemologi dan sistem nilainya masing-masing (Simanullang et al., 2021). Meskipun memiliki perbedaan yang mencolok dalam aspek teoretis dan ideologis, ketiga pendekatan ini memiliki titik temu dalam hal kepedulian terhadap keseimbangan distribusi pendapatan dan dampak ketimpangan terhadap stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, memahami titik persamaan dan perbedaan ketiga pendekatan ini menjadi penting sebagai bekal dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih adil, kontekstual, dan berkelanjutan (Putri & Natha, 2014).

1. Persamaan

a) Kesadaran akan Eksistensi Ketimpangan

Ketiga pendekatan ekonomi sama-sama mengakui bahwa ketimpangan distribusi pendapatan adalah realitas yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan ekonomi modern. Dalam ekonomi klasik, ketimpangan dianggap sebagai bagian dari dinamika awal pembangunan ekonomi. Adam Smith dan David Ricardo menyadari bahwa dalam tahap-tahap awal pertumbuhan ekonomi, akumulasi modal cenderung terkonsentrasi pada pemilik modal, namun pada akhirnya mekanisme pasar diyakini akan menciptakan keseimbangan baru. Dalam ekonomi Islam, ketimpangan secara moral dan normatif dianggap sebagai sesuatu yang harus dikendalikan karena bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan tanggung jawab kolektif umat. Ketimpangan yang ekstrem dianggap sebagai bentuk tidak berkahnya rezeki dan penyimpangan dari prinsip *ukhuwah* (persaudaraan). Sementara itu, ekonomi modern, khususnya sejak munculnya teori Kuznets dan kritik-kritik terhadap neoliberalisme, secara eksplisit menyoroti ketimpangan sebagai hambatan terhadap inklusif pembangunan dan penyebab utama ketidakstabilan sosial-politik (Kusrini et al., 2009).

b) Pentingnya Peran Negara

Meskipun dengan kadar dan pendekatan berbeda, ketiga sistem ini sama-sama menyadari bahwa peran negara sangat krusial dalam menciptakan keseimbangan distribusi pendapatan. Ekonomi klasik mengakui perlunya keberadaan institusi negara yang menjamin hak milik, hukum, dan kebebasan pasar. Bahkan dalam tahap-tahap tertentu, intervensi minimal dibutuhkan untuk mencegah distorsi yang mengganggu kompetisi sehat. Ekonomi Islam justru menempatkan negara dalam posisi yang lebih proaktif. Negara bukan hanya penengah, tetapi pelaksana distribusi, regulator pasar, serta pengelola instrumen fiskal syariah seperti zakat dan *baitul mal*. Negara bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat secara spiritual dan material. Ekonomi modern, terutama pasca-Perang Dunia II, menunjukkan pergeseran ke arah peran negara yang lebih aktif melalui kebijakan fiskal dan moneter, sistem jaminan sosial, pendidikan publik, dan intervensi pada pasar tenaga kerja guna menciptakan distribusi pendapatan yang lebih adil (Wulandari et al., 2016).

c) Pentingnya Keadilan Distribusi

Ketiga pendekatan ini menekankan bahwa sistem ekonomi yang baik harus menjamin adanya bentuk keadilan dalam distribusi. Ekonomi klasik mengaitkan keadilan dengan kontribusi yaitu pendapatan didasarkan pada peran dan produktivitas masing-masing faktor produksi. Ekonomi Islam menekankan bahwa keadilan bukan hanya bersifat formal, tetapi juga substantif: kekayaan tidak boleh hanya beredar di antara orang kaya saja (Q.S. Al-Hasyr: 7), dan hak orang miskin merupakan bagian dari kekayaan orang kaya. Ekonomi modern, seiring berkembangnya pemikiran keadilan sosial dan kesetaraan peluang, menekankan pentingnya *redistributive justice*.

2. Perbedaan

a) Filosofi Dasar dan Tujuan Ekonomi

Ekonomi klasik bertumpu pada rasionalitas individu, efisiensi pasar, dan kebebasan ekonomi. Tujuan utama adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi melalui pembebasan kekuatan pasar. Sementara ekonomi Islam didasarkan pada wahyu dan ajaran Nabi Muhammad SAW, yang memadukan nilai spiritual dengan kebutuhan ekonomi. Tujuannya tidak hanya kemakmuran dunia, tetapi juga keselamatan akhirat (*falāh*). Ekonomi modern, sebagai kelanjutan dan koreksi terhadap pendekatan klasik, menekankan keseimbangan antara efisiensi

dan keadilan, dengan tujuan mencapai pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

b) Instrumen Distribusi Pendapatan

Ekonomi klasik menekankan mekanisme harga dan pasar sebagai alat utama distribusi. Tidak ada sistem pajak progresif atau kebijakan sosial dalam bentuk negara kesejahteraan. Ekonomi Islam menggunakan instrumen khusus berbasis ibadah dan kewajiban sosial seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, dan larangan riba untuk mengarahkan kekayaan kepada kelompok rentan. Ekonomi modern mengembangkan berbagai instrumen redistribusi seperti pajak progresif, transfer tunai bersyarat, asuransi sosial, dan program pelatihan kerja untuk menciptakan pemerataan.

c) Pandangan terhadap Peran Pasar

Ekonomi klasik mengidealkan pasar sebagai institusi yang efisien dan adil secara alami. Pasar bebas dianggap mampu mengalokasikan sumber daya secara optimal tanpa campur tangan eksternal. Sebaliknya, ekonomi Islam menerima pasar sebagai sarana, bukan tujuan. Pasar harus diawasi dan diatur agar tidak merugikan pihak lemah dan tidak menjadi sarana penindasan ekonomi. Ekonomi modern bersikap pragmatis terhadap pasar. Ia mengakui keunggulan pasar dalam efisiensi, namun juga menyadari bahwa pasar bisa gagal (*market failure*), sehingga membutuhkan regulasi (Tiara, 2016).

d) Penilaian terhadap Ketimpangan

Ekonomi klasik menilai ketimpangan sebagai hal yang bisa diterima selama sesuai dengan kontribusi produktif individu. Bahkan, ketimpangan dapat menjadi insentif bagi kerja keras dan inovasi. Ekonomi Islam menganggap ketimpangan yang ekstrem sebagai bentuk ketidakadilan dan keserakahan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Ekonomi modern memandang ketimpangan sebagai ancaman terhadap mobilitas sosial dan kohesi masyarakat, serta penghambat pertumbuhan jangka panjang karena menurunkan permintaan agregat.

e) Arah Kebijakan dan Solusi

Kebijakan dalam ekonomi klasik cenderung *non-intervensionis*, berfokus pada liberalisasi ekonomi. Ekonomi Islam menyarankan solusi yang berbasis pada moralitas dan solidaritas sosial, seperti optimalisasi zakat, wakaf produktif, dan sistem keuangan syariah ekonomi modern, terutama dalam kerangka ekonomi kesejahteraan (*welfare economics*), mendorong kebijakan yang bersifat

redistributif dengan pendekatan berbasis data dan inklusivitas, seperti penguatan UMKM, perluasan pendidikan, dan sistem jaminan sosial universal (Yusuf Wibowo, n.d.).

4. KESIMPULAN

Ketimpangan distribusi pendapatan merupakan permasalahan yang tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, politik, dan moralitas. Ketiga pendekatan besar dalam pemikiran ekonomi ekonomi klasik, ekonomi Islam, dan ekonomi modern menawarkan kerangka teori dan solusi yang berbeda dalam memahami serta menangani permasalahan tersebut. Pendekatan ekonomi klasik melihat ketimpangan sebagai fenomena alamiah yang akan terkoreksi melalui mekanisme pasar. Para tokohnya seperti Adam Smith, David Ricardo, dan Thomas Malthus berpendapat bahwa distribusi pendapatan akan membaik seiring pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Namun demikian, pendekatan ini cenderung mengabaikan faktor struktural dan sosial yang mempengaruhi distribusi, sehingga kurang mampu menjawab kompleksitas ketimpangan di era modern. Sementara itu, ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang lebih holistik dan berbasis nilai. Prinsip keadilan (*al-'adl*), keberkahan (*barokah*), dan kesejahteraan kolektif (*maslahah*) menjadi landasan utama dalam sistem distribusi. Adapun ekonomi modern mengembangkan pendekatan yang lebih pragmatis dan berbasis data. Ketimpangan dipandang sebagai ancaman terhadap pertumbuhan inklusif dan stabilitas sosial, sehingga memerlukan intervensi aktif dari negara melalui kebijakan fiskal dan sosial. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa untuk mengatasi ketimpangan distribusi pendapatan secara menyeluruh, diperlukan pendekatan yang integratif dan adaptif, yang tidak hanya mengandalkan mekanisme pasar atau intervensi teknokratik, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai moral, etika, dan keadilan sosial. Ketiga pendekatan tersebut dapat saling melengkapi dalam merumuskan strategi distribusi pendapatan yang adil, berkelanjutan, dan kontekstual, khususnya dalam menjawab tantangan pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang seperti Indonesia.

REFERENSI

- Adolph, R. (2016). *Tinjauan Umum Tentang Distribusi Pendapatan Untuk Pendidikan Anak Dalam Islam*. 1–23.
- Chayyani, N. R. (2021). Ketimpangan Pendapatan Dan Pemulihan Ekonomi Nasional. *The Indonesian Institute Center of Public Policy Research*, 1–25.

- Fish, B. (2020). *ANALISIS KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN*. 2507(February), 1–9.
- Hariadi, P., Bawono, I. R., & Arintoko. (2007). Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Kabupaten Banyumas Jawa Tengah. *Ekonomi Pembangunan*, 61–70.
- Hartono, D., & Resosudarmo, B. P. (2004). Analisis Dampak Kebijakan Harga Energi terhadap Perekonomian dan Distribusi Pendapatan di DKI Jakarta: Aplikasi Model Komputasi Keseimbangan Umum. In *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* (Vol. 5, Issue 1, pp. 83–102). <https://doi.org/10.21002/jepi.v5i1.101>
- Ii, B. A. B. (2010). *BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Kajian Pustaka 2.1.1. Ketimpangan*. 14–42.
- Kusrini, N. ., Irham, Darwanto, D. H., & Jamhari. (2009). Dampak penggunaan varietas unggul terhadap distribusi pendapatan petani jagung di Kalimantan Barat. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 7(43).
- Madnasir, M. (2011). Distribusi dalam Sistem Ekonomi Islam. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(1), 57. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v2i1.57-71>
- Maskur, S. R. R., Aedy, H., Saenong, Z., Tajuddin, Alwi, S., & Barani, L. O. S. (2023). Pengaruh Ketimpangan Pendapatan, Pengangguran, dan Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Indonesia Periode 2017-2021. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan*, 8(1), 82–95.
- Putri, N. P., & Natha, I. K. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Pendapatan. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 4(1), 41–49.
- Siara, E. (2021). Analisis Ketimpangan DIstribusi Pendapatan Masyarakat Di Kabupaten Aceh Tengah Kecamatan Bebesan. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2013–2015.
- Simanjorang, R. M., Studi, P., & Informatika, T. (2009). *Sumatera Utara Sumatera Utara*. 4(2), 1000000.
- Simanullang, U. B. J., Manullang, M., Siregar, R. T., & Damanik, S. E. (2021). Hubungan Tingkat Pendapatan Dengan Faktor Sosial Ekonomi Serta Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Desa Huta Gurgur Kecamatan Dolok Sanggul. *Jurnal Regional Planning*, 3(1), 29–38. <https://doi.org/10.36985/jrp.v3i1.610>
- Sondakh, C. A. (2023). Analisis Ketimpangan Pendapatan dan KualitasPertumbuhan Ekonomi Empat Kota di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(4), 1–11.
- Sugianto, & Mohammad, F. (2024). Waqaf Produktif: Menggerakkan Perekonomian Rakyat Menuju Ketahanan Ekonomi Berkelanjutan. *Opportunity Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 136–145. <https://doi.org/10.55352/ojppm.v2i1.946>

- Sugianto, S. (2025). *MODEL PEMBERDAYAAN EKONOMI BERBASIS KAMPUNG SDGs TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi Kasus Pusat Pengembangan Kampung SDGs Indonesia Kabupaten Jember)* [Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta]. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/70741/>
- Syahputra, F., Lestari, D. A. H., & Prasmatiwi, F. E. (2018). Analisis Struktur Dan Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Serta Tingkat Kesejahteraan Anggota Koperasi Serba Usaha Peternak Motivasi Doa Ikhtiar Tawakkal (Ksup Mdit) Di Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus. *Jurnal Ilmu-Ilmu Agribisnis*, 6(1), 95. <https://doi.org/10.23960/jiia.v6i1.95-102>
- Tiara, S. (2016). Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Propinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomikawan*, 5, 1–16.
- Wulandari, N. T., Darwanto, D. H., & Irham, I. (2016). Analisis Nilai Tambah Dan Kontribusi Industri Kerajinan Bambu Pada Distribusi Pendapatan Masyarakat Di Kabupaten Sleman. *Agro Ekonomi*, 26(2), 192. <https://doi.org/10.22146/agroekonomi.17271>
- Yusuf Wibowo, S. (n.d.). *80923-ID-dampak-krisis-ekonomi-terhadap-distribus.pdf*.
- Zuraidah. (2013). Penerapan Konsep Moral Dan Etika Dalam. *Hukum Islam*, XIII(1), 140.